

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

1. Teori Makro

Mangkoesebroto (2013:169-173) berpendapat bahwa teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu:

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial.

b. Hukum Wagner

Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organi mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya.

c. Teori Pecoock dan Wiesman

Teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar. Teori tersebut didasari oleh bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besar pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah

2. Teori Mikro

Teori ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk

barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja (Mangkoesebroto, 2017:177). Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah antara lain (Mangkoesebroto, 2017:177):

- a. Perubahan kualitas barang publik
- b. Perubahan permintaan akan barang publik
- c. Perubahan harga faktor produksi
- d. Perubahan kegiatan pemerintah dalam memproduksi barang

2.1.2 Teori Pembangunan Ekonomi

Nurman (2015:90) menyatakan pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Istilah pembangunan ekonomi diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan atas Pendapatan Nasional Bruto atau GNP (*Gross National Product*) atau *Gross Domestic Product* (GDP) Pada tingkat 5% hingga 7%.

Nurman (2015:119) menyatakan bahwa teori pembangunan yang ada selama ini dikenal dapat di kelompokkan menjadi Lima paradigma yaitu:

1. Teori Klasik

Teori ini muncul sebelum tahun 1870, yang termasuk golongan ini adalah Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo dan John Stuart Mill. Para ahli ekonomi klasik banyak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Dalam menganalisisnya mengedepankan masalah-masalah pembangunan ekonomi. Dalam menganalisisnya

mengedepankan masalah-masalah pembangunan ekonomi, sebab-sebab dari perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan masalah proses terjadinya pertumbuhan tersebut.

2. Teori Karl Marx

Karl Marx dalam *Das Capital* meramalkan bahwa kapasitas akan mengalami keruntuhan dalam jangka panjang dan atas dasar ini maka komunis mulai mencari format barunya. Untuk memahami konsep Marx ini perlu memperhatikan tahapan perkembangan dalam masyarakat, yaitu:

- a. Sejarah Perkembangan Masyarakat yang terdiri dari tahap *Primitive Communal*, Perbudakan (*Slavery*), Masyarakat Feodal, Masyarakat Kapitalis dan Masyarakat Sosialis.
- b. Perkembangan dan kehancuran kapitalis yang terdiri dari Masa Kosentasi, Akumulasi dan Kesengsaraan serta masa krisis.
- c. Pembangunan Ekonomi Terencana.

3. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual tetapi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus (*Discontinuous*), yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseiriabangan yang telah ada. Perkembangan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk mengembangkan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian menurut Schumpeter dalam jangka Panjang ia merasa pesimis karena dalam

jangka panjang kapitalis akhirnya akan mengalami kemandegan (*stagnation*) atau Kehancuran.

4. Teori Neo Klasik

Yang termasuk dalam golongan ini adalah teori-teori sesudah tahun 1870 an yaitu Alfred Marshall, Leon Walras dan Knu Wicksel. Neo Klasik membahas masalah yang bersifat jangka pendek dalam kegiatan masyarakat dan sedikit sekali analisisnya masalah pembangunan ekonomi. Dalam jangka panjang mekanisme pasar akan melahirkan perekonomian yang stabil dengan sendirinya, sekalipun perekonomin tumbuh secara perlahan tetapi akan lancar dan teratur. Kaum Neo-Klasik banyak menyumbangkan pendapatnya terhadap teori tingkat suku bunga dan dengan demikian banyak membahas masalah akumulasi kapital. Perkembangan ekonomi sangat tergantung pada beberapa hal seperti:

- a. Akumulasi kapital merupakan faktor terpenting dalam perkembangan ekonomi.
- b. Perkembangan itu merupakan proses yang gradual.
- c. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- d. Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan.
- e. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut.

5. Teori Keynesian

Bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkan demikian pula sebaliknya. Volume pekerjaan

tergantung pada permintaan yang dihasilkan demikian pula sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif tergantung pada pertemuan antara barang permintaan untuk konsumsi dan investasi. Sedang permintaan konsumsi sangat bergantung pada kecenderungan untuk berkonsumsi sangat tergantung pada kecenderungan untuk berkonsumsi yang kenaikannya tidak secepat kenaikan pendapatan.

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (UU No. 33/2014 pasal 1). Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi/kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan belanja, urusan wajib di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga upaya pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut diwujudkan melalui prestasi kinerja dalam pencapaian standar minimal sesuai peraturan perundang-perundangan.

Belanja modal menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Definsi lainnya, seperti yang dijelaskan dalam peraturan Menteri dalam Negeri No. 13 Tahun 2016, Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Belanja Daerah

Menurut peraturan menteri dalam negeri No. 13 Tahun 2016 unsur-unsur belanja daerah antara lain:

1. Belanja tidak langsung

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

- a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang di berikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sebagai ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok uang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi

- dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
- d. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
 - e. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
 - f. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan bersifat khusus pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2. Belanja Langsung

Berdasarkan peraturan dalam negeri No 13 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. Belanja pegawai, untuk penguaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengeluaran barang yang nilai manfaatnya kurang dari Dua Belas bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/pengadaan, sewa rumah/gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
- c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam

rangka pembelian, pengadaan, atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari Dua Belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia dan pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu di biayai kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya (UU No 33/2014 pasal 1) pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pinjaman daerah. Pembiayaan daerah adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau sebagai alokasi surplus anggaran. Adanya pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin inofatif yaitu dapat memisahkan pinjaman dan pendapatan daerah.

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Pengertian Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja langsung yang salah satu unsurnya yaitu belanja modal. Belanja modal adalah biaya yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat yang lebih dari Dua Belas bulan untuk digunakan untuk kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli atau bangun aset.

2.1.4.2 Klasifikasi Belanja Modal

Menurut peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2015, belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya. Yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja modal juga dimaksudkan untuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas, dan kualitas aset. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 klarifikasi utama berikut ini yaitu:

1. Belanja modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran yang digunakan sebagai pengadaan atau pembelian pembebasan penyelesaian balik nama dan sewa tanah, pengosongan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat untuk pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan atau penambahan, penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari Dua Belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, atau penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja modal jalan

Belanja modal jalan, irigrasi dan jaringan adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan, pembangunan, pembuatan, serta perawatan. Dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan jalan, irigrasi,

dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigrasi, dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja modal lainnya

Belanja modal lainnya adalah pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk pengadaan untuk penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigrasi, dan jaringan termasuk dalam belanja ini adalah belanja kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala, dan barang museum, buku-buku, dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

2.1.4.3 Indikator Belanja Modal

Belanja modal jumlah dari belanja tanah, belanja peralatan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, belanja irigasi, dan belanja lainnya. Pengeluaran untuk perolehan aset (aset tetap) yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Maka belanja modal meliputi belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

2.1.5 Kemiskinan

2.1.5.1 Pengertian Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok

orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok atau dasar. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau suatu golongan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak, meliputi pangan dan non pangan.

Menurut (Nurwati, 2008) Kemiskinan merupakan masalah yang selalu dihadapi manusia. Masalah kemiskinan memang sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri dan implikasi permasalahan-nya dapat melibatkan berbagai segi kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah sosial yang sifatnya mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan berbeda-beda. Selain itu, kemiskinan dapat dilihat sebagai masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan

memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum yaitu kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.

2.1.5.2 Jenis – Jenis Kemiskinan

Jenis-jenis (Ramdass, 2010) kemiskinan menurut dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

a. Kemiskinan absolut

Seseorang dapat dikatakan termasuk golongan miskin absolut bila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.

b. Kemiskinan relatif

Seseorang dapat dikatakan termasuk golongan kondisi miskin relatif karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.

c. Kemiskinan kultural

Seseorang dapat dikatakan termasuk golongan miskin kultural mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

d. Kemiskinan struktural

Seseorang dapat dikatakan termasuk golongan miskin struktural yaitu ketika situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.1.5.3 Pengukuran Kemiskinan

Menurut (Ramdass, 2010) kemiskinan dalam dimensi ekonomi paling mudah untuk diamati, diukur, dan diperbandingkan. Ada beberapa metode pengukuran tingkat kemiskinan yang dikembangkan di Indonesia, yaitu:

- a. Biro pusat statistik mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu kurang dari 2100 kalori per orang per hari (dari 52 jenis komoditi yang dianggap mewakili pola konsumsi penduduk yang berada di lapisan bawah), dan konsumsi nonmakanan (dari 45 jenis komoditi makanan sesuai kesepakatan nasional dan tidak dibedakan antara wilayah pedesaan dan perkotaan). Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk susunan umur, jenis kelamin, dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk.
- b. tingkat kemiskinan didasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Daerah pedesaan:

1. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 320 kg nilai tukar

2. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 240 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3. Paling miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 180 kg nilai tukar beras per orang per tahun.

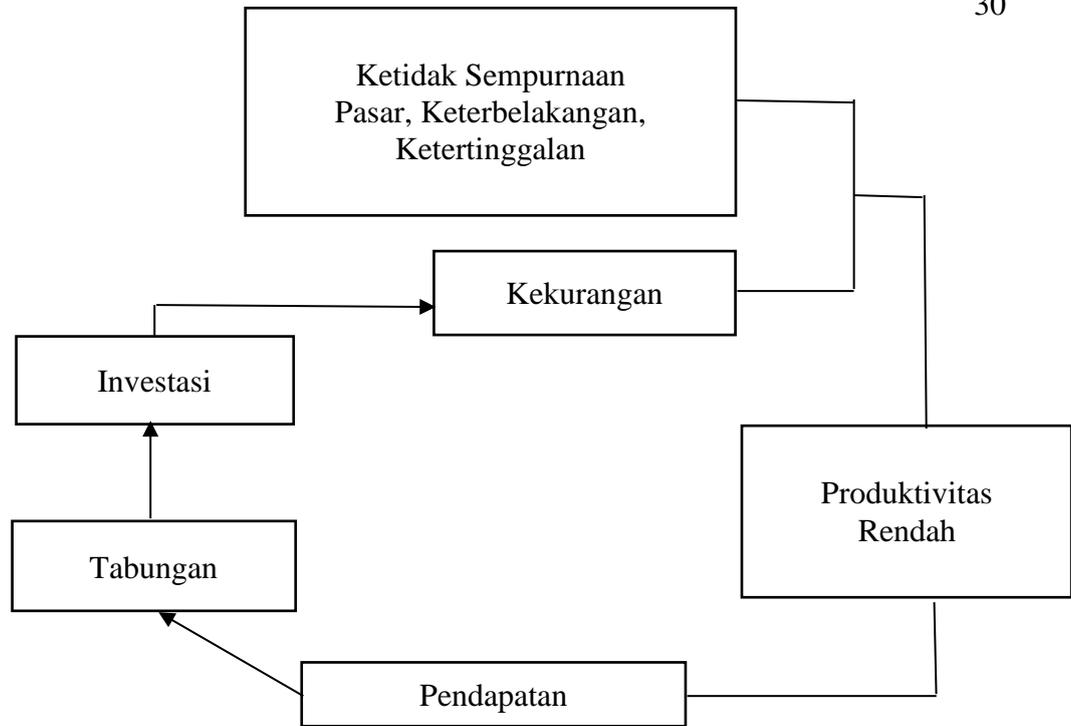
Daerah perkotaan:

1. Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 480 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 2. Miskin sekali: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 380 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
 3. Paling Miskin: bila pengeluaran keluarga lebih kecil daripada 270 kg nilai tukar beras per orang per tahun.
- c. Bank Dunia mengukur garis kemiskinan berdasarkan pada pendapatan seseorang kurang dari US\$1 per hari (setara Rp8.500,00 per hari)
- d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 8: mengukur kemiskinan berdasarkan kriteria Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS 1). Kriteria Keluarga Pra KS yaitu keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan perintah agama dengan baik, minimum makan dua kali sehari, membeli lebih dari satu stel pakaian per orang per tahun, lantai rumah bersemen lebih dari 80%, dan berobat ke Puskesmas bila sakit. Kriteria Keluarga Sejahtera 1 (KS 1) yaitu keluarga yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan perintah agama dengan baik, minimal satu kali per minggu makan daging/telor/ikan, membeli pakaian satu stel per tahun, rata-rata luas lantai rumah 8 m² per anggota keluarga, tidak ada

anggota keluarga umur 10 sampai 60 tahun yang buta huruf, semua anak berumur antara 5 sampai 15 tahun bersekolah, satu dari anggota keluarga mempunyai penghasilan rutin atau tetap, dan tidak ada yang sakit selama tiga bulan.

2.1.5.4 Teori Lingkaran Kemiskinan

Ketiga Penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) menurut Nurkse (Kuncoro, 2006:120) yaitu adanya keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, dan kurangnya modal mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima, rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. rendahnya investasi berakibatpada keterbelakangan, dan seterusnya. Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh tidak adanya pembangunan dimasa lalu tetapi kemiskinan juga menjadi faktor penghambat pembangunan dimasa yang akan datang.



Gambar 2.1
Teori Lingkaran Kemiskinan Nurkse

2.1.5.5 Indikator Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, indikator kemiskinan terdiri dari (Badan Pusat Statistik, 2016):

- a. *Head Count Index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- b. *Poverty Gap Index* (Indeks kedalaman kemiskinan), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- c. *Poverty Severity Indeks* (Indeks keparahan kemiskinan), merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

2.1.6 Kesejahteraan Masyarakat

2.1.6.1 Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

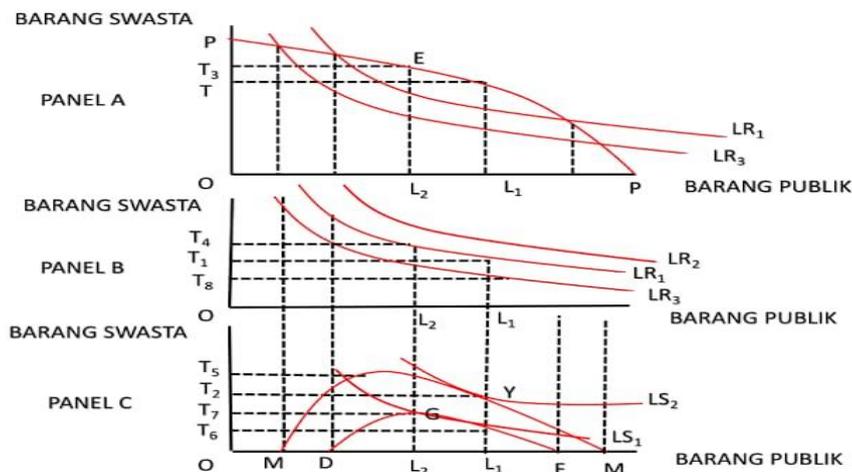
Menurut Badan Pusat Statistik kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar dapat hidup layak. Kesejahteraan masyarakat disebut juga dengan kesejahteraan sosial, Menurut Undang-Undang No 11 tahun 2009:12 kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur.

Pencapaian kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari setiap pembangunan ekonomi pencapaian kesejahteraan juga merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini Thomas dkk (2005:15) menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat menengah kebawah.

2.1.6.2 Teori Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Arsyad (2013) Dalam teori ekonomi mikro ada yang dikenal dengan teori Pareto yang menjelaskan tentang tiga jenis tingkatan kesejahteraan, yaitu:

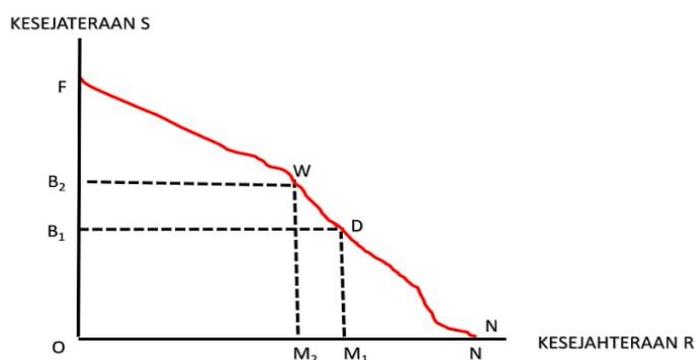
1. Pareto Optimal, dalam tingkatan pareto optimal terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang atau kelompok pasti akan mengurangi kesejahteraan orang atau kelompok lain.
2. Pareto Non Optimal, dalam kondisi pareto non-optimal terjadinya kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan orang lain.
3. Pareto Superior, dalam kondisi pareto superior terjadinya peningkatan kesejahteraan seseorang tidak akan mengurangi kesejahteraan tertinggi dari orang lain. Menurut teori pareto tersebut, ketika kondisi kesejahteraan masyarakat sudah mencapai pada kondisi pareto optimal maka tidak ada lagi kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan. Samuelson seorang mantan pemenang hadiah Nobel menyempurnakan teori barang swasta maupun barang publik. Samuelson menyatakan bahwa adanya barang publik yang mempunyai dua karakteristik (*non-exclusionary* dan *non-rivalry*) tidaklah berarti bahwa perekonomian tidak dapat mencapai kondisi pareto optimal atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang optimal. Fungsi kepuasan masyarakat dalam mengkonsumsi barang swasta maupun barang publik dapat dilihat pada gambar berikut (Arsyad 2013).



Gambar 2.2
Teori Pareto Samuelson

Pada panel C adalah kurva indeferens individu S, pada panel A bila pemerintah menyediakan barang publik sebesar OL_1 maka barang tersebut dapat dinikmati oleh R dan S dalam jumlah yang sama, produksi barang publik sebesar OL_1 akan menyebabkan alokasi ekonomi untuk barang swasta sebesar O_r unit barang publik sebesar OL_1 maka R akan mengkonsumsi barang swasta sebesar OT_1 , barang publik sebesar OL_1 tersebut tersedia juga untuk individu S dan akan mengkonsumsi barang swasta sebesar O_s di panel A dikurangi OT_1 yang dikonsumsi oleh R (panel B) yaitu OT_2 pada panel C, apabila barang publik yang tersedia untuk R dan S sebanyak OL_2 maka barang swasta yang dapat diproduksi sebesar OT_3 dari jumlah tersebut agar individu R tidak berkurang kesejahteraannya, maka ia harus mengkonsumsi barang swasta sebesar OT_4 sehingga yang tersedia bagi S sebanyak OT_6 yaitu $OT_3 - OT_4$ (panel C). Selanjutnya akan didapatkan kurva DFG pada panel C yaitu kombinasi barang publik dan swasta yang tersedia untuk S dengan kondisi kesejahteraan R yang tidak berubah seperti terlihat LR_1 pada panel A.

Jika kurva indeferens bukan kurva indeferens LR_i tetapi LR_3 yang menunjukkan kesejahteraan R yang lebih rendah, maka dengan langkah di atas kita akan mendapatkan kurva konsumsi barang swasta dan barang publik oleh S yang ditunjukkan oleh kurva MYM , sehingga dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.3
Kurva Kesejahteraan

Kurva MYM menyinggung kurva indeferens LS_2 pada titik Y dimana barang pemerintah yang dikonsumsi oleh R dan S adalah OL_i unit. Barang Swasta yang dikonsumsi oleh S sebanyak OT_2 dan oleh R sebanyak OT_8 yaitu $OT_2 + OT_8 = OT$ yaitu jumlah seluruh barang swasta yang dihasilkan. Jadi dalam analisis ini kita dapat melihat jika kesejahteraan R turun, maka kesejahteraan S akan naik.

2.1.6.3 Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Badan Pusat Statistik program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat karena masyarakat merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam mengukur tercapai tidaknya pembangunan di suatu wilayah dibutuhkan aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, Ketenagakerjaan, pola

konsumsi rumah tangga, perumahan dan lingkungan, kemiskinan dan sosial lainnya.

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan pembangunan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan dan pekerjaan. Indeks Pembangunan Manusia suatu tolak ukuran angka kesejahteraan suatu daerah atau negara yang dilihat berdasarkan tiga dimensi yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf (*literacyrate*), rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli (*purchasing power parity*).

Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) IPM berkisar antara 0 – 100, dimana daerah yang nilai IPM > 50 berada pada kelas pembangunan manusia yang rendah, daerah dengan IPM yang berkisar antara 50-65,99 berada pada kelas pembangunan manusia menengah ke bawah, sedangkan daerah dengan nilai IPM berkisar antara 66-80 berada pada kelas pembangunan manusia tinggi.

2.1.7 Hubungan Belanja Modal, Tingkat Kemiskinan, Dengan Kesejahteraan Masyarakat

2.1.7.1 Hubungan Belanja Modal Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Abdul Halim (2004:73) belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang akan menambah aset atau kekayaan daerah. Sehingga belanja modal merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan

dan peningkatan pelayanan fasilitas publik.

Menurut Abdul Halim (2014:225) menyatakan apabila pemerintah mampu menggunakan belanja modal secara bijaksana, maka diharapkan akan memberikan efek multifier dalam perekonomian. Menurut Soepangat (1991:52) peningkatan belanja modal yang menyebabkan peningkatan penyediaan layanan barang dan jasa kepada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selain itu, belanja modal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya sarana prasarana dan fasilitas umum yang memadai, maka kegiatan perekonomian tidak terhambat.

Menurut Badrudin (2012:65) pengalokasian belanja modal harus melalui pertimbangan, perkiraan, dan perhitungan yang panjang. Hal tersebut dikarenakan belanja modal membutuhkan biaya yang cukup besar dan pengembalian dalam jangka waktu tidak sebentar. Selain itu, Belanja modal diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam pengelolaan belanja modal harus dengan mempertimbangkan secara matang dan dengan penuh perhatian agar alokasi belanja berdampak kepada masyarakat. Salah satunya dengan terus meningkatkan proporsi alokasi belanja modal lebih tinggi dari belanja belanja lainnya di struktur APBD untuk menunjang program kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.7.2 Hubungan Tingkat Kemiskinan Dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kemiskinan didefinisikan sebagai standar hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Secara ekonomis,

kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang (Yasa, 2005).

Menurut (Dwi Krisna et al., 2022) Tingginya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah mencerminkan bahwa hasil pembangunan tidak tersebar secara merata, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat belum tercapai. Penduduk yang termasuk dalam penduduk miskin pada umumnya memiliki keterbatasan pada faktor produksi, sehingga akses terhadap kegiatan ekonomi mengalami hambatan. Akibatnya produktivitas menjadi rendah yang menyebabkan pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan hidup pun jauh dari cukup, sehingga masyarakat semakin sulit untuk mencapai kesejahteraan.

Pemerintah memiliki peran dalam kemajuan pembangunan daerah dan mengelola sumber daya pada daerahnya untuk mengurangi tingkat kemiskinan sehingga berpengaruh dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan menjadi salah satu agenda utama Pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Hal ini telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Menjalankan agenda tersebut, memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha (sektor swasta), dan masyarakat.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Made Puriartha Dwi Krisna (2022) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Serta Kesejahteraan Masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali 2014 - 2019". Pada penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan program SPSS dan Microsoft Excel. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, variabel pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, variabel pengangguran tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, variabel kemiskinan berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, variabel kemiskinan tidak mampu memediasi pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pengangguran terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali 2014-2019.

Penelitian ini dilakukan oleh Utami & Indrajaya (2019) "Pengaruh PAD Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017". Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisis jalur (*path analysis*) dengan program SPSS. Pada hasil analisis teknik *path analysis* menunjukkan pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2012-2017.

Penelitian ini dilakukan oleh Bustamam (2021) "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Pekanbaru". Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan program SPSS dan Microsoft Excel. Hasil regresi linear berganda menunjukkan variabel Persentase Penduduk Miskin tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru, dan variabel PDRB secara parsial PDRB berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan oleh Endy Grade Tampubolon (2019) "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia Tahun 2014-2017". Dalam penelitian ini menggunakan teknik *Structural Equation Model* (SEM) dengan program SPSS. Diketahui bahwa Variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Artinya semakin besar belanja pemerintah yang dialokasikan pada belanja modal, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga hipotesis H_1 diterima. Variabel Pertumbuhan Ekonomi juga berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Artinya bahwa apabila terjadi pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka hipotesis H_2 diterima.

Penelitian ini dilakukan oleh Ari Hidayat (2022) "Pengaruh Belanja Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pambang Pesisir kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis Provinsi Riau". Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel. Hasil analisis regresi linear sederhana menunjukkan variabel Belanja Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa Pambang Pesisir sebesar 0,888 atau 88,8%, sedangkan sisanya 11,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar studi iniseperti akuntabilitas pengelola keuangan desa, pendapatan asli desa, pertumbuhan ekonomi desa yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di desa Pambang Pesisir kecamatan Bantan kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Penelitian ini dilakukan oleh Indra Imelda Sope (2019) "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Sulawesi Utara". Pada penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS dan Microsoft Excel. Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2.585 sedangkan Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan memberikan pengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara Sebesar 6.299.

Penelitian ini dilakukan oleh Nasriadi "Pengaruh belanja Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa". Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan program SPSS dan microsoft excel.

Hasil regresi linear berganda menunjukkan variabel belanja modal memiliki hubungan yang positif dan tidak signifikan dalam mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. Pengaruhnya dijelaskan oleh nilai koefisien variabel belanja modal -0.227 , variabel DAK menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa dengan mengasumsikan bahwa variabel selain dari DAK tetap, indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan koefisien sebesar 2.047% pada setiap persen peningkatan yang terjadi pada DAK, variabel Gini Ratio menunjukkan hubungan yang positif terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Gowa. apabila Gini Ratio bertumbuh sebesar 1% maka ini kesejahteraan masyarakat akan tumbuh 20.770% .

Penelitian ini dilakukakan oleh Rahma Dewi Pristian Putri "Efisiensi Relatif Belanja Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat: Studi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020" Penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan menggunakan program SPSS dan microsoft excel. Hasil data panel menunjukkan variabel efisiensi belanja kesehatan dan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di 38 Kabupaten/Kota Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya efisiensi belanja kesehatan dan ekonomi maka cenderung meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Indeks Pembangunan Ekonomi di suatu wilayah.

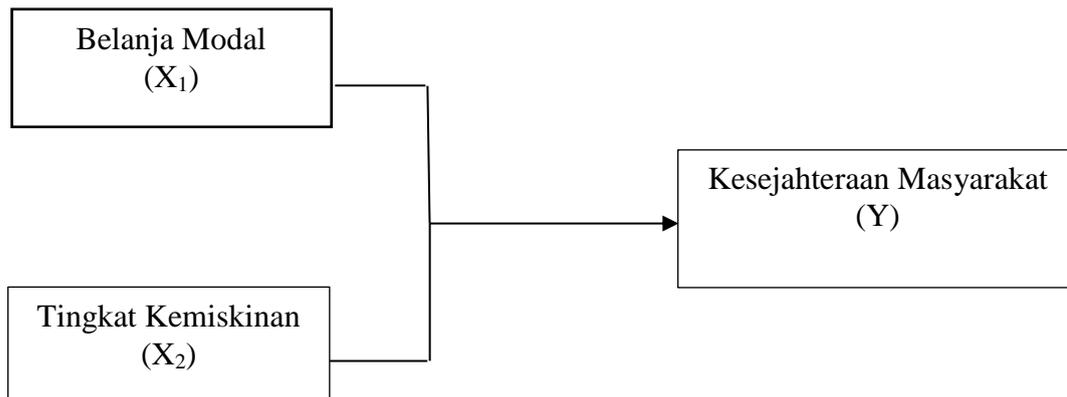
Penelitian ini dilakukan oleh Risqi Noor Hidayati Putri Analisis Efisiensi Belanja Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Blitar Jawa

Timur". Penelitian ini menggunakan regresi linear dengan program SPSS dan microsoft excel. Hasil efisiensi belanja pendidikan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat yaitu dengan nilai probabilitas sebesar 0,0097, artinya Pendidikan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat. efisiensi belanja kesehatan memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan nilai probabilitas sebesar 0,0007, artinya kesehatan berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat, belanja infrastruktur memiliki pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap IPM dengan nilai probabilitas sebesar 0,4348.

Penelitian ini dilakukan oleh Dewi Sintia Bolung "Analisis Dampak Kemiskinan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Kawiley Kecamatan Kauditan pada Masa Pandemi". Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan program SPSS. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pada masa pandemi tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kawiley mengalami penurunan dan menyebabkan terjadinya kemiskinan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai variabel dan berbagai teori yang dideskripsikan, sehingga kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.4
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dalam penelitian ini penulis mengemukakan kerangka pemikiran yang bertitik tolak dari latar belakang masalah. Masalah yang diambil tersebut disajikan dalam judul yang memiliki dua variabel yaitu Belanja Modal (X₁) dan variabel Tingkat Kemiskinan (X₂), serta satu variabel yang dipengaruhi yaitu Kesejahteraan Masyarakat (Y).

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini hipotesis penelitiannya adalah diduga ada pengaruh signifikan Pengaruh Belanja Modal (X₁) dan Tingkat Kemiskinan (X₂) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) Provinsi Sumatera Selatan baik secara persial maupun simultan.